

Rapat Pleno Rekomendasi Peta RTRW



Pemberian Rekomendasi

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) pada hari Jumat, 23 Agustus 2019 kembali melaksanakan Rapat Pleno Pemberian Rekomendasi Persetujuan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti beberapa hasil kegiatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) Terekomendasi Paket 2 tahun 2019, sekaligus untuk mempercepat penyelesaian peta rencana tata ruang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan Peta RTR wajib dikonsultasikan oleh penyusun ke Badan Informasi Geospasial, sehingga aktivitas asistensi dan supervisi Peta RTR ke BIG menjadi suatu kewajiban bagi daerah. Asistensi dan supervisi merupakan pemeriksaan peta oleh tim teknis, sedangkan rapat pleno merupakan sidang terbuka yang dihadiri oleh tim penguji dari luar Pusat PTR.

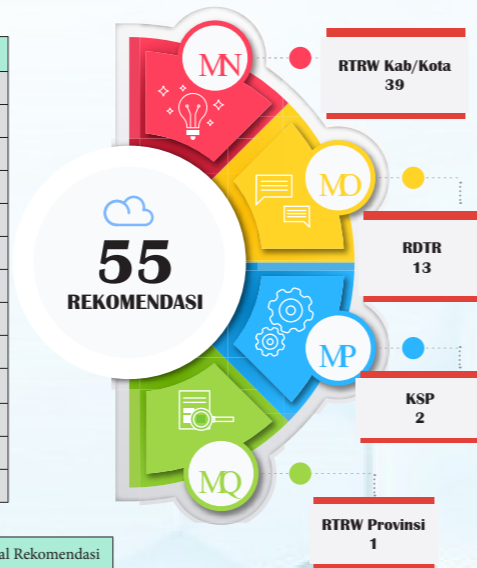
Rapat pleno merupakan rangkaian akhir dari proses asistensi dan supervisi Peta RTR yang disusun pemerintah daerah. Setelah menyelesaikan tahapan pelaksanaan asistensi dan supervisi, kemudian diusulkan untuk pemberian persetujuan peta RTR. Pada rapat pleno dilakukan proses uji petik peta untuk melihat kesesuaian Peta RTR yang dihasilkan dengan standar penyusunannya. Aspek uji petik dalam rapat pleno mencakup geometris, kelengkapan tematik dan perencanaan serta kartografis Peta RTR.

Rapat pleno dilakukan secara bersamaan untuk dua belas (12) Peta RTRW bertempat di Hotel Royal Padjadjaran Bogor. Pleno dihadiri oleh dua belas (12) Pemerintah Kabupaten/Kota dari delapan (8) provinsi. Peta RTRW yang dibahas dalam pleno ini adalah RTRW Kabupaten Tabanan, RTRW Kota Bogor, RTRW Kota Batu, RTRW Kabupaten Ciamis, RTRW Kabupaten Gunung Kidul, RTRW Kota Tomohon, RTRW Kabupaten Banyumas, RTRW Kabupaten Bandung Barat, RTRW Kabupaten Magetan, RTRW Kabupaten Wonosobo, RTRW Kabupaten Batubara, dan RTRW Kabupaten Pesawaran. Ke dua belas Peta RTRW yang diplenokan merupakan bagian dari target 100

RTRW terekomendasi untuk tahun 2019.

Pelaksanaan pleno menghadirkan tim penguji dari luar Pusat PTR yaitu peneliti utama dari Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama - BIG, antara lain Prof. Dr. Fahmi Amhar, Dr. Priyadi Kardono dan Prof. Dr. Dewayany. Penguji internal dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas adalah Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang (Ryan Pribadi). Kepala PTR, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, dalam arahnya mengharapkan agar Peta RTRW yang disusun oleh pemerintah daerah dapat terjamin kualitasnya berdasarkan data yang terkini dan akurat. Hal ini agar perencanaan pemanfaatan ruang menjadi lebih baik dengan memperhatikan aspek kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menarik investasi ke wilayahnya. Berdasarkan hasil kesepakatan penilaian antara Kepala Pusat PTR dan tim penguji, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diuji pada sidang rapat pleno kali ini seluruhnya mendapatkan rekomendasi. [Izzuddin Abdul Aziz, 2019]

Progres Asistensi Tata Ruang



Rekomendasi Peta RDTR

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekomendasi
Bali	Buleleng	Gerokgak	2019-01-15
Jawa Timur	Pamekasan	Pamekasan	2019-03-05
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Obi	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Ngrambe	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Kedunggalar	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Widodaren	2019-03-26
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kota Kambang	2019-03-26
Papua	Merauke	Tanah Miring	2019-03-26
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Labuha	2019-03-26
NTB	Lombok Tengah	KEK Mandalika	2019-03-26
Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Tobadak	2019-04-30

Rekomendasi Peta KSP

Provinsi	KSP	Tanggal Rekomendasi
Banten	KP3B Banten	2019-03-26
Banten	Banten Lama	2019-03-26

Rekomendasi Peta RTRW Provinsi

RTRW Provinsi	Tanggal Rekomendasi
Nusa Tenggara Timur	2019-04-30

Rekomendasi Peta RTRW Kota/Kab

Provinsi	RTRW Kab/Kota	Tanggal Rekomendasi
Banten	Serang	2019-01-17
Sumatera Barat	Sijunjung	2019-01-24
Jawa Timur	Kota Malang	2019-01-29
Papua	Nabire	2019-02-18
Banten	Kota Tangerang Selatan	2019-02-19
Banten	Kota Tangerang	2019-02-26
Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	2019-03-05
Jawa Tengah	Temanggung	2019-03-26
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	2019-03-26
Jawa Tengah	Kendal	2019-03-26
Sumatera Barat	Agam	2019-03-26
Kalimantan Tengah	Kapuas	2019-03-26
Jawa Tengah	Semarang	2019-04-05
Riau	Kota Dumai	2019-04-23
Kalimantan Tengah	Barito Utara	2019-05-10
Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	2019-05-17
DIY	Kulonprogo	2019-07-24
Kalimantan Tengah	Katingan	2019-07-24
Kepulauan Riau	Karimun	2019-07-24
Jawa Timur	Sampang	2019-07-24
Jawa Tengah	Wonogiri	2019-07-24
Jawa Tengah	Banjarnegara	2019-07-24
Jawa Timur	Ngawi	2019-07-24
Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	2019-07-24
Jambi	Kota Sungai Penuh	2019-07-24
Sumatera Selatan	Banyuasin	2019-07-24

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

TATA RUANG & ATLAS
NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

4TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

Dua perhelatan menarik yang mewarnai aktivitas penyelenggaraan informasi geospasial di bulan Agustus ini yaitu *Information Geospatial Technology Exhibition (IGTE)* dan *Indonesia Esri User Conference (IEUC)* 2019. Dua perhelatan tersebut sekaligus menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 50. Pembukaan acara tersebut dihadiri langsung oleh Jack Dangermond, pendiri sekaligus tokoh dibalik suksesnya ESRI mendominasi aplikasi GIS di seluruh dunia. IEUC 2019 ini adalah perhelatan pertama dari para pengguna ESRI di Indonesia, sementara *ESRI user conference* sendiri selalu diadakan tiap tahun di Sandiego Amerika Serikat yang dihadiri tidak kurang dari 16.000 pengguna produk ESRI seluruh dunia.

Alhamdulillah pada dua acara pembukaan tersebut, BIG meluncurkan (*launching*) sistem rekomendasi peta tata ruang secara elektronik (RPTR online). Sistem ini mengandalkan pada penilaian mandiri dalam menyusun tata ruang, *upload* bukti kualitas peta, dan memilih

jadwal pelaksanaan pleno untuk uji petik peta tata ruang oleh BIG. Sistem juga bersifat *auto approved*, atau seluruh proses pemeriksaan seketika diketahui oleh pemohon jadwal uji petik peta tata ruang oleh BIG, sesuai amanah yang diminta dalam PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta.

Lahirnya ide rekomendasi online ini tidak lepas dari adanya tuntutan percepatan penyelesaian tata ruang nasional yang dinilai sangat lambat. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan bahwa tata ruang provinsi diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan tata ruang kabupaten/kota ditetapkan 3 tahun setelah UU ditetapkan. Sementara rencana detail tata ruang (RDTR) ditetapkan selama 36 bulan sejak tata ruang kabupaten /kota selesai. Status terakhir 2019 baru sekitar 459 dari 514 tata ruang kabupaten/kota yang selesai dan hanya 53 RDTR yang disahkan dari 1800 jukam RDTR yang diamanahkan dalam RPJMN.

Percepatan penyelesaian tata ruang semakin dituntut setelah keluarnya Peraturan Presiden No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *online single submission* (OSS). Adanya OSS ini

akan memangkas berbagai persyaratan perijinan, bahkan untuk RDTR yang seharusnya 36 bulan dipangkas menjadi hanya selama 6 bulan. Pemangkas waktu penyusunan RDTR, didasari akan pentingnya informasi tata ruang sebagai salah satu faktor penting penyelesaian konflik pemanfaatan lahan dan kenyamanan berinvestasi. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah BIG khususnya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas merasa bertanggung jawab untuk ikut melakukan terobosan dan inovasi guna percepatan pemberian rekomendasi melalui pengurangan waktu asistensi dan kemudahan pengajuan permohonan rekomendasi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, khususnya kepada tim kreatif dari PPTRA semoga *launching* sistem RPTR online ini memberi manfaat banyak pihak. Aamiin [Mulyanto Darmawan, 2019]



Kebijakan & Isu Strategis

Nilai sumberdaya alam (SDA) mulai menjadi perhatian Kementerian Keuangan khususnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal ini mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun selama ini belum mencantumkan nilai terkait dengan SDA. Salah satu penyebabnya adalah dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) prinsip dasar pengungkapan pada laporan keuangan adalah obyektivitas, terukur, terverifikasi dan handal, sehingga untuk dapat mencantumkan nilai SDA tersebut memerlukan upaya yang cukup besar. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal yang sebelumnya sulit akan menjadi lebih mudah.

Mengingat urgensi nilai SDA pada LKPP, maka penyusunan pemetaan neraca SDA merupakan langkah yang sangat penting untuk ditempuh, sebagaimana yang telah dilakukan negara lain seperti Kanada, Perancis, dan Norwegia. Usaha negara-negara tersebut bahkan telah terintis sejak tahun 1970. Satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan neraca SDA adalah kesamaan pemahaman

dan persepsi antara pemerintah, *stakeholder* dan auditor (BPK). Pencantuman nilai SDA ini menurut Direktur Puitang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) merupakan amanat dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2018. Hasil review tersebut menyebutkan bahwa pemerintah perlu mencantumkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset SDA, volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya, serta pendapatan fiskal dari pengelolaan SDA dalam LKPP.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pada Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa Neraca SDA dan LH merupakan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi disamping 3 instrumen lain, yaitu penyusunan PDB dan PDRB LH, kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Dalam hal penyusunan Neraca ini, BIG dapat bekerjasama dengan BPS dalam penyediaan Pemetaan

Neraca SDA dan data pemetaan tematik skala kecil - menengah. BPS juga menyediakan data statistik Neraca SDA yang terdapat dalam publikasi Sistem Neraca Lingkungan-Ekonomi Indonesia (SISNERLING). Saat ini sedang dilakukan rapat rapat Pokja Neraca SDA-LH untuk menyusun peraturan teknis turunan dari PP No. 46 tahun 2017. Peran serta BIG sangat diharapkan terutama dalam penyediaan peta penutup lahan skala kecil - menengah setiap tahun (multi temporal) dengan kelas tutupan lahan sesuai dengan SNI Neraca SDA tahun 2015.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dibenahi antara lain: (1) belum ada bisnis proses yang menyeluruh terhadap penyusunan Neraca SDA-LH di tingkat pemerintah pusat, (2) belum adanya kesamaan metodologi antar Kementerian dan Lembaga walaupun sudah ada SNI Neraca SDA, (3) masih terbatasnya data multi temporal dalam penyusunan Neraca SDA-LH. [Diah Retno Minarni, 2019]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |

| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |

| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



Curug-Curug sekitar Gunungapi Slamet



Curug Jenggala

Keberadaan 'curug' atau air terjun disekitar Gunungapi Slamet merupakan tanda kekayaan alam berupa sumberdaya air yang melimpah. Air menggelontor jatuh dari tebek lereng, beralaskan batuan vulkanik, bergemuruh jatuh ke bagian dasar sungai, lalu bergerak menuju

muara. Sebagian volume airnya dimanfaatkan untuk sumber air minum, pembangkit listrik, dan sawah irigasi. Nun jauh di bagian hulunya, dipastikan terdapat mata air yang menyuplai air hingga mengalir deras. Bisa dibayangkan apabila mata air mengering karena perubahan penggunaan lahan di bagian hulu dan faktor yang bersifat merusak lain maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Setidaknya terdapat 20 curug disekitar Gunungapi Slamet yang tersebar di 5 kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagian nama-nama curug sudah dikenal yaitu Curug Cipendok, Bengkawah, Jenggala, dan Sibelid. Beberapa nama lainnya mungkin masih asing di telinga, contohnya

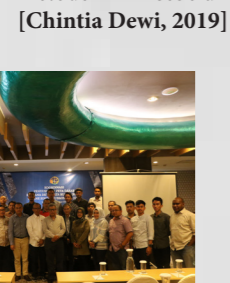
Curug Gomblang, Ceheng, dan Cantel. Banyaknya curug di sekeliling Gunungapi Slamet dan airnya termanfaatkan menjadi bukti bahwa keberadaan gunung tertinggi di Jawa Tengah ini menjadi urat nadi penting kehidupan masyarakat di 5 kabupaten tersebut.

PPTRA melakukan survei keberadaan curug-curug tersebut sebagai bagian dari survei Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Slamet. Survei dilakukan pada tanggal 13-21 Agustus 2019 oleh Tim Teknis PPTRA berkolaborasi dengan Tim Fakultas Pertanian UGM. Informasi geospasial tentang curug dan bentang sumberdaya lainnya menjadi masukan penting dalam penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa Bagian Tengah. [Fakhrudin Mustofa, 2019]

Klinik Asistensi dan Supervisi Peta RDTR Online Single Submission untuk 57 Kabupaten/Kota

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN, pada tanggal 27-28 Agustus 2019 telah melaksanakan klinik asistensi dan supervisi di 57 Kabupaten/Kota. Klinik ini diikuti oleh tim penyusun RDTR OSS untuk 57 Kabupaten/Kota dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Klinik asistensi dan supervisi dilaksanakan untuk wilayah dengan kriteria telah memiliki peta dasar dan telah memiliki citra satelit resolusi tinggi Ortho. Pelaksanaan klinik hari pertama tanggal 27 Agustus ditujukan untuk Direktorat Penataan Kawasan serta Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Daerah. Pada hari kedua tanggal 28



Peserta Klinik

Pra Survei dan Koordinasi dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam

Regulasi tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 7 Tahun 2018. KLHS yang dimaksud harus mencakup analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam KLHS, kondisi umum daerah terkait aspek geografis, sumberdaya, dan demografis harus tergambar secara komprehensif. Untuk aspek sumber daya alam, data penting yang digunakan adalah potensi dan pemanfaatannya. Data dan informasi tentang potensi, pemanfaatan, serta saldo SDA dapat diperoleh melalui analisis Neraca Sumberdaya Alam (NSDA). Dengan demikian, NSDA menjadi hal penting dalam mendukung penyusunan KLHS.

Untuk lebih menggaungkan pentingnya NSDA dalam mendukung penyusunan KLHS, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) akan melaksanakan Sosialisasi Neraca Spasial Sumberdaya Alam yang bertema "Pemanfaatan Neraca Spasial Sumberdaya Alam untuk Mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD". Sosialisasi ini nantinya akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo pada tanggal 19 September 2019. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan menghadirkan narasumber handal dari beberapa

kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian LHK. Sebagai peserta, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada tingkat provinsi/kabupaten/kota diundang untuk saling bertukar pikiran dan diskusi tentang proses serta kendala dalam penyusunan KLHS.

Sebagai bentuk persiapan, tim teknis Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, yang terdiri atas Sri Eka Wati, Dinar Farahiyah Rahmah, dan Moeniroch melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo pada tanggal 20-22 Agustus 2019. Koordinasi dimaksudkan untuk memperoleh dukungan daerah dalam proses penyebarluasan informasi dan undangan serta keterlibatan beberapa personil di daerah dalam acara sosialisasi. Selain koordinasi, dilakukan juga pra survei untuk menentukan lokasi acara yang paling representatif. Penentuan lokasi acara menjadi penting karena harus mempertimbangkan kapasitas ruangan, fasilitas yang disediakan, ketersediaan kamar, dan aksesibilitas. Dengan demikian, acara sosialisasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar. [Sri Eka Wati, 2019]



Diskusi Bersama

PPTRA Laksanakan Survei Kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca SDA untuk Dukong KLHS di Pulau Madura



Foto Bersama

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada wilayah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KLHS menjadi penting sebagai dukungan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Neraca sumberdaya alam (SDA) dapat menjadi masukan yang sangat penting untuk mendukung penyusunan KLHS karena informasi tentang potensi dan

pemanfaatan sumberdaya alam dapat diperoleh melalui analisis neraca.

Pada tahun 2019, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, khususnya Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS) melaksanakan Kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam untuk Dukungan KLHS pada 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Purbalingga, Gianyar, Klungkung, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sebagai bagian dari kegiatan ini, pada tanggal 30 Juli-2 Agustus 2019, tim teknis PDS yang terdiri atas Sri Eka Wati, Moeniroch, Noor Adhi Sakti, dan Supraptinah melakukan survei pengumpulan data sekunder ke beberapa instansi pada empat kabupaten di Pulau Madura dan Provinsi Jawa Timur. Instansi yang dikunjungi antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten,

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur, serta Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Melalui survei tersebut, telah terkumpul data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dokumen KLHS, dokumen Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), statistik kabupaten dalam angka, serta hidrologi wilayah sungai (debit, sebaran pos duga air, curah hujan, dan wilayah irigasi). Data tersebut nantinya akan dianalisis untuk menghitung neraca, proyeksi kebutuhan lahan dan air, analisis daya dukung daya tampung, serta integrasi dengan KLHS. [Sri Eka Wati, 2019]



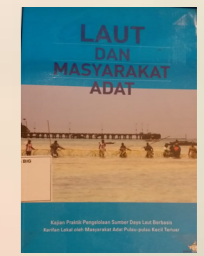
LAUT DAN MASYARAKAT ADAT

Kajian Praktik Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal oleh Masyarakat Adat Pulau - Pulau Kecil Terluar

Masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya laut karena mereka identik dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam di wilayahnya. Mereka merawatnya dan cenderung mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Buku ini hadir untuk dapat membantu memberikan gambaran terhadap kondisi dan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah pulau - pulau kecil, agar terjaga keberlanjutannya.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai pemahaman terhadap masyarakat adat itu sendiri dan contoh eksistensi pengelolaan Sasi Laut di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya, dibahas pula mengenai Abanfan Matilon : kearifan lokal masyarakat Pulau Liki dalam pengelolaan pesisir, nelayan kecil di wilayah perbatasan Pulau Kawio Sulawesi Utara,

Judul Buku : Laut dan Masyarakat Adat
Penulis : Kajian Praktik Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal oleh Masyarakat Adat Pulau - Pulau Kecil Terluar
Penerbit : Buku Kompas
Halaman : xvi + 224 Halaman



Temu Ilmiah BIG-Yayasan Kebun Raya Indonesia



Kunjungan Ilmiah oleh DWP-BIG

Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) didirikan atas inisiatif Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001. Pendirian YKRI bertujuan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman tumbuhan tropis Indonesia, khususnya spesies tumbuh-tumbuhan yang dikategorikan langka. Melalui moto "Membantu Yang Hampir Punah dan Menyelamatkan yang Masih Ada", lembaga ini terus bergerak maju dalam upaya pelestarian tumbuhan langka. Salah satu aktivitasnya adalah melakukan kunjungan ilmiah ke BIG tanggal 12 Juli 2019 dalam rangka meminta masukan BIG mengenai aspek geospasial/ruang lahan tanaman obat. BIG dengan segala sumberdaya yang dimiliki memberikan penjelasan tentang ruang yang diperuntukkan untuk budidaya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut pertemuan ilmiah tersebut sekaligus dalam rangka Ulang Tahun BIG ke-50, BIG melalui Dharma Wanita Persatuan melakukan kunjungan ilmiah ke YKRI di Jagakarsa, Jakarta

Selatan pada tanggal 13 Agustus 2019. Bertempat di pendopo joglo bagian dari kebun rindang milik YKRI seluas 8.000 m², Dharma Wanita Persatuan BIG memperoleh masukan dari pihak yayasan tentang fungsi tanaman obat. Sebagai contoh daun Stevia sebagai pengganti gula pasir, daun Ungu manjur untuk obat ambien, batu ginjal, hepatitis, kembang Teleng untuk obat sakit mata, serta daun Puleh Pandak sebagai obat tekanan darah tinggi, vertigo, dan luka akibat gigitan kalajengking. Lebih lanjut, BIG juga dikenalkan cara-cara dan praktek cara budidaya tanaman seperti perbanyakan tanaman dengan stek dan okulasi.

Melalui kedua aktivitas ilmiah tersebut, diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk memperkuat tugas masing-masing. Masukan ilmiah BIG dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan lokasi bagi YKRI, sedangkan pembelajaran fungsi tumbuhan dan tanaman obat dari YKRI dapat menjadi inspirasi bagi warga BIG untuk selalu ikut menjaga kelestarian tumbuhan langka. [Wahyu Tri Handayani, 2019]